

Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Periode 2018-2020)

Zahra Putri Khoerunnisa Rahmat*, Diamonalisa Sofianty

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*Zhr108putri@gmail.com, diamonalisa@yahoo.com

Abstract. This research was motivated by the Covid-19 Pandemic which caused a decrease in taxpayer income and low public consumption due to a decrease in purchasing power. So that during the Covid-19 pandemic, people prioritize spending for daily needs and delay paying taxes even though they are due. This study aims to determine the effect of Motorized Vehicle Tax (PKB) and Motor Vehicle Transfer Fees (BBNKB) on Bandung City Original Revenue in 2018-2020. The research method used is descriptive verification method with a quantitative approach. The population of this study was taken from the realization and budget reports of the city of Bandung. The data collection technique used is Documentation. Hypothesis testing using multiple linear regression with SPSS software and F test, t test and simultaneous and partial determination. The results of the study indicate that the Motor Vehicle Tax (PKB) and the Transfer of Ownership Fee for Motor Vehicles (BBNKB) have a significant and positive effect on Regional Original Revenue. Suggestions for further researchers to add variables that can affect Regional Original Income in the city of Bandung.

Keywords: *Motorized Vehicle Transfer Fee, Motor Vehicle Tax, Regional Original Income.*

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Pandemi Covid-19 yang menyebabkan penurunan pendapatan para Wajib Pajak dan rendahnya konsumsi masyarakat akibat penurunan daya beli. Sehingga saat Pandemi Covid-19 ini masyarakat lebih mengutamakan pengeluarannya untuk kebutuhan sehari-hari dan menunda membayar Pajak meski sudah jatuh tempo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Bandung Tahun 2018-2020. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode Deskriptif Verifikatif dengan pendekatan Kuantitatif. Pengambilan populasi penelitian ini dari laporan realisasi dan anggaran kota Bandung. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah Dokumentasi. Pengujian hipotesis menggunakan regresi linier berganda dengan software SPSS dan uji F, uji t serta determinasi simultan dan parsial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Saran bagi peneliti selanjutnya untuk menambahkan variabel yang dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di kota Bandung.

Kata Kunci: *Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Kendaraan Bermotor, Pendapatan Asli Daerah.*

A. Pendahuluan

Melemahnya perekonomian masyarakat akibat pandemi COVID-19 berdampak langsung pada Pendapatan Daerah di Jawa Barat. Secara khusus, penurunan pendapatan daerah akibat Pajak Kendaraan Bermotor yang menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar hingga saat ini disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang masih berlangsung. Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung akan bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar untuk melakukan terobosan lebih lanjut, terutama untuk meningkatkan Pendapatan Daerah dari PKB. Artinya, mendorong Wajib Pajak untuk mencapai komitmennya dalam berbagai program bantuan dan stimulus. Kerja sama ini bertujuan untuk mengoptimalkan Pendapatan Daerah di Jawa Barat dan di Bandung, khususnya di bidang Pajak Kendaraan. Kami berharap layanan pembayaran Pajak Kendaraan akan meningkat dan ekonomi lokal akan membaik (bandung.bisnis.com).

Tidak tercapainya Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Daerah khususnya penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor disebabkan karena rendahnya pendapatan Wajib Pajak dan rendahnya konsumsi masyarakat akibat daya beli yang rendah. Oleh karena itu, di masa Covid-19 saat ini, masyarakat memilih memprioritaskan biaya tersebut untuk kebutuhan sehari-hari dan menunda pembayaran pajak meski sudah habis masa tempo. Penurunan pendapatan PKB juga disebabkan oleh kurangnya keputusan PKB dan kurangnya keputusan penetapan harga PKB. Tidak ada penetapan tarif PKB secara bertahap atas kepemilikan mobil dan motor pribadi yang bukan kepemilikan semula, sehingga diperlukan optimalisasi di sektor pajak dalam pendataan dan pengambilan keputusan (daerah.sindonews.com).

Salah satu sumber pendapatan yang sangat berperan penting dalam keberlangsungan pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan adalah penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang salah satunya yaitu berasal dari Pajak Daerah. Ada dua jenis pajak daerah yang memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Penurunan Pendapatan Daerah akan sangat berdampak pada proses pembangunan di wilayah Jawa Barat. Pemprov Jabar harus betul-betul cermat dalam memanfaatkan sumber pendapatan yang tersedia. Pendapatan Daerah juga bisa ditingkatkan dengan optimalisasi aset-aset daerah sebagai jalan keluar bagi Pemprov untuk menambah Pendapatan Daerah (transindonesia.co).

Dalam pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Bank BJB mendukung Program Triple Untung Plus di Pusat Pengelolaan Pendapatan (P3) Daerah (bandung.bisnis.com). Selain itu tim Pembina Samsat Bapenda Jawa Barat telah menerapkan cara-cara untuk menyebarluaskan informasi terkait keringanan membayar pajak melalui program Triple Untung Plus. Salah satu cara untuk melakukannya yaitu menyebarkan luaskan informasi dengan berkeliling mengendarai bus bandros. Program ini memiliki tiga keuntungan dari yaitu bebas denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), bebas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ke-2 (BBNKB II) dan bebas tunggakan PKB thn ke 5. Program ini juga akan berlangsung mulai dari 1 Agustus hingga 24 Desember 2021. Serta jika Wajib Pajak membayar pajak dengan patuh satu bulan sebelum tanggal habis tempo pajak, Wajib Pajak akan menerima cashback 2% dan setinggi-tingginya 6 bulan sebelum habis tempo Wajib Pajak diberikan diskon sebesar 10%, dan potongan 2,5% akan diberikan kepada Wajib Pajak yang membeli kendaraan baru (BBNKB I) untuk permohonan daftar ulang kendaraan (news.detik.com).

Berdasarkan beberapa peneliti terdahulu tentang Pendapatan Asli Daerah, variabel yang sangat berpengaruh yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (Setiawan, Isporima: 2021). Dan penelitian (Anggraini, Arisman, Yunita: 2015) besaran penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor memberikan kontribusi yang signifikan dan berpengaruh positif terhadap jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Dari latarbelakang yang telah dijelaskan, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah ?
2. Bagaimana pengaruh Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah?

Tujuan penelitian ini diuraikan untuk mengetahui pokok-pokok yaitu sebagai:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah.

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah metode ilmiah untuk memperoleh data untuk tujuan serta kegunaan tertentu (Sugiyono, 2017:2) Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif verifikatif dengan penelitian kuantitatif. Populasi yang diambil penulis dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2018-2020 sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pengambilan sampel untuk penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik *non-probability sampling*. Adapun cara pengambilan sampelpya yaitu dengan menggunakan purposive sampling. Dalam penelitian ini, yang menjadi kriteria pengambilan keputusan yang digunakan sebagai sampel adalah laporan realisasi anggaran tahun 2018-2020 akibat fenomena yang terjadi pada tahun 2018-2020.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (X_1) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (X_2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y)

Berikut ini adalah hasil penelitian mengenai dampak pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (Periode 2018-2020). Selain itu, data tersebut diuji dengan menggunakan aplikasi SPSS. Hasil pengujian ditunjukkan pada tabel berikut :

1. Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 1. Uji Analisis Regresi Berganda

Model	Coefficients ^a				t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	-.471	.554			-.850	.402
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	2.077	.071	.819		29.150	.000
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	.800	.119	.188		6.702	.000

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS, 2022

Berdasarkan hasil dari output diatas, model persamaan regresi linier berganda dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

$$Y = -0,471 + 2,077 X_1 + 0,800 X_2 + e$$

Dari hasil persamaan regresi diatas, masing-masing variabel dapat diinterpretasikan sebagai berikut ini :

1. Nilai konstanta sebesar -0,471, artinya bila variabel Pajak Kendaraan Bermotor (X_1) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (X_2) bernilai 0, maka variabel Pendapatan Asli Daerah (Y) menurun sebesar -0,417.
2. Nilai Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 2,077, artinya bahwa jika Pajak Kendaraan Bermotor mengalami peningkatan, maka Pendapatan Asli Daerah diprediksi akan

meningkat sebesar 2,077.

3. Nilai Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar 0,800, memiliki arti jika Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mengalami peningkatan, maka diprediksikan Pendapatan Asli Daerah akan meningkat sebesar 0,800.

2. Uji F

Tabel 2. Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	28556.512	2	14278.256	5964.342	.000 ^b
	Residual	79.000	33	2.394		
	Total	28635.511	35			

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

b. Predictors: (Constant), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS, 2022

Berdasarkan hasil tabel 2, diperoleh nilai signifikan 0,000 yang artinya adalah nilai $0,000 < 0,05$. Disimpulkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

3. Uji t

Tabel 3. Uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.471	.554		-.850	.402
	<u>Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)</u>	2.077	.071	.819	29.150	.000
	<u>Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)</u>	.800	.119	.188	6.702	.000

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS, 2022

Dari hasil tabel 3 diatas, penentuan hipotesis dengan uji parsial sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil olah data diatas, Pajak Kendaraan Bermotor diduga mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan tabel 3 diatas, Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari tingkat $\alpha = 0,05$. Arah koefisien yang dihasilkan menunjukkan nilai positif 2,077. Artinya hipotesis yang dirumuskan oleh peneliti diterima. Hal ini bisa dikatakan artinya bahwa Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Samsat III Soekarno-Hatta kota Bandung.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diduga mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan tabel diatas, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari tingkat $\alpha = 0,05$. Arah koefisien yang dihasilkan menunjukkan nilai positif 0,800. Artinya hipotesis yang dirumuskan oleh peneliti diterima. Hal ini dikatakan bahwa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Samsat III Soekarno-Hatta kota Bandung.

4. Koefisien Determinasi

Tabel 4. Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.999 ^a	.997	.997	1.54724

a. Predictors: (Constant), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS, 2022

Berdasarkan dari hasil perhitungan tabel 4 diatas, diperoleh bahwa nilai koefisien adalah 99,7%. Yaitu, besar pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah 99,7%. Sedangkan 0,3% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.

5. Koefisien Determinasi Parsial

Tabel 5. Koefisien Determinasi Parsial

Model	Standardized Coefficients	Correlations		
	Beta	Zero-order	Partial	Part
1 (Constant)				
<u>Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)</u>	.819	.997	.981	.267
<u>Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)</u>	.188	.962	.759	.061

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 2022

Berdasarkan perhitungan tabel 5 diatas, yaitu dapat diketahui variabel Pajak Kendaraan Bermotor memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 81,65% dan variabel Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 18,08%.

D. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan ini terkait “Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018-2020 Pada Samsat III Soekarno-Hatta kota Bandung”, berikut penulis menarik kesimpulan dari hasil penelitian diatas :

1. Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
2. Pengaruh Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Acknowledge

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu menyelesaikan penelitian ini dan berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua orang.

Daftar Pustaka

- [1] Agung, M. (2014). *Perpajakan Indonesia*. Lentera Ilmu Cendekia.
- [2] Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka cipta.
- [3] Bougie, U. S. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan-Keahlian, Edisi 6, Buku 1, Cetakan Kedua*. Jakarta Selatan 12610.: Salemba Empat.
- [4] Budi Kusuma Wijaya, e. (2016). Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2014. *vol 2 No. 2*.
- [5] Firdausy, C. (2017). Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional. Cetakan pertama. *Yayasan Pustaka Obor Indonesia*.
- [6] Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8). Cetakan ke VIII*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- [7] Halim, A. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Revisi*. Jakarta: Salemba Empat.
- [8] Isporima, D. S. (2021). Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Periode 2013 – 2019. *Jurnal JISIPOL Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung*.
- [9] Lestari, D. S. (2020). *SPSS*. Bandung: Unisba.
- [10] Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- [11] _____. (2017). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- [12] _____. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Andi.
- [13] Margaretha Anggraini, A. A. (2015). Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Sumatera Selatan.
- [14] Marihot Siahaan Pahala, S. M. (2013). *Pajak Daerah & Retribusi Daerah. Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- [15] Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun. 2020. *tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan*.
- [16] Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 68 Tahun. 2011. *tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Bbnkb)*. Jawa Barat: Peraturan Gubernur
- [17] Putu Rakatitha Nadya Kardevi, d. G. (2017). Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Akuntansi Vo 21.2 Universitas Udayana*.
- [18] Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus (Edisi ke 10 Buku 1)*. Jakarta.
- [19] Roger, U. S. (2016). *Research Methods For Business: A Skill Building Approach, 7th Edition*. New Jersey: Wiley.
- [20] Ruslinda Agustina, R. A. (2015). Analisis Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
- [21] Sarasa, A. B. (2021, Juli 29). *Pendapatan Daerah Turun, Wagub Jabar: Konsekuensi Melemahnya Ekonomi Masyarakat*. Diambil kembali dari daerah.sindonews: <https://daerah.sindonews.com/read/495902/701/pendapatan-daerah-turun-wagub-jabar-konsekuensi-melemahnya-ekonomi-masyarakat-1627535263>
- [22] Sekaran, U. (2011). *Research Methods For Business (Metode Penelitian Untuk Bisnis)*. Jakarta: Salemba Empat.
- [23] Siregar, B. (2017). *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN: UPP STIM YKPN.
- [24] Sugiyono. (2013). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Salemba Empat.

- [25] _____. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- [26] _____. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- [27] _____. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.
- [28] Sujarweni, V. W. (2014). *Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- [29] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun. (2007). Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- [30] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun. (2009). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- [31] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun. (2004). Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.
- [32] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun. (2000). Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- [33] Wijaya, T. (2009). *Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- [34] Wanda, Adi Putra. & Halimatusadiah, Elly. (2021). *Pengaruh Solvabilitas dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak*. *Jurnal Riset Akuntansi*. 1(1), 59-65